



Peran Tokoh Agama Islam dalam Dinamika Politik Lokal di Riau

Fitra Hadi Khaz*, Ferdiansyah Syahputra, Muhammad Faiza, Hendri Kasuma, M Zaqilman, Jamal Muhammad

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning Dumai

Abstrak: Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang sangat religius, di mana terdapat hubungan erat antara agama dan politik, terutama di tingkat lokal. Di Provinsi Riau, tokoh agama Islam memiliki posisi sosial yang strategis dan berpengaruh dalam membentuk opini publik serta preferensi politik masyarakat. Mengingat tingkat religiositas yang tinggi di wilayah ini, keterlibatan tokoh agama dalam politik lokal menjadi fenomena yang tak terpisahkan dari proses pemilihan umum dan pengambilan keputusan politik. Akan tetapi, peran tokoh agama Islam dalam politik praktis membawa berbagai implikasi, termasuk legitimasi politik dan potensi polarisasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran tokoh agama Islam dalam dinamika politik lokal di Riau, serta menganalisis pengaruh dan tantangan yang muncul dari keterlibatan mereka. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara mendalam dan analisis data sekunder dari literatur, media massa, dan dokumen terkait. Dalam penelitian ini, tokoh agama Islam dipandang sebagai aktor sosial yang berfungsi sebagai pemimpin spiritual, sumber legitimasi moral, dan mediator antara kepentingan politik dan nilai-nilai keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan elektabilitas calon, membangun kesadaran politik masyarakat, serta meredakan konflik sosial. Kendati demikian, keterlibatan dalam politik juga dapat menimbulkan polarisasi dan menurunkan kepercayaan sebagian jamaah. Oleh karena itu, diperlukan sikap bijaksana dan pembatasan peran yang proporsional agar kontribusi tokoh agama Islam dapat memperkuat demokrasi lokal tanpa mengganggu kohesi sosial.

Kata Kunci: Tokoh Agama, Politik Lokal, Riau, Pemilihan Umum, Legitimasi

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3613>

*Correspondence: Fitra Hadi Khaz

Email: fitrahadikhaz@gmail.com

Received: 22-04-2026

Accepted: 22-05-2026

Published: 22-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Indonesia is a country with a highly religious society, where a close relationship exists between religion and politics, particularly at the local level. In Riau Province, Islamic religious leaders occupy a strategic social position and play a significant role in shaping public opinion and political preferences within society. Given the high level of religiosity in this region, the involvement of religious leaders in local politics has become an inseparable phenomenon in electoral processes and political decision-making. However, the engagement of Islamic religious leaders in practical politics brings various implications, including political legitimacy and the potential for social polarization. This study aims to explore the role of Islamic religious leaders in the dynamics of local politics in Riau, as well as to analyze the influence and challenges arising from their political involvement. The study employs a qualitative method with a case study approach, utilizing in-depth interviews and secondary data analysis from relevant literature, mass media, and official documents. In this research, Islamic religious leaders are viewed as social actors who function as spiritual leaders, sources of moral legitimacy, and mediators between political interests and religious values. The findings indicate that Islamic religious leaders have a significant influence on increasing candidates' electability, enhancing public political awareness, and mitigating social conflicts. Nevertheless, their involvement in politics may also lead to polarization and a decline in trust among certain segments of the community. Therefore, a prudent and proportionate limitation of roles is necessary to ensure that the contribution of Islamic religious leaders strengthens local democracy without undermining social cohesion.

Keywords: Religious Leaders, Local Politics, Riau, Elections, Legitimacy

Pendahuluan

Dinamika politik di Indonesia, khususnya di daerah Riau, dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah peran tokoh agama. Tokoh agama di Riau memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk opini public dan memengaruhi keputusan politik di tingkat lokal. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana tokoh agama berperan dalam dinamika politik lokal, termasuk dalam pemilihan umum dan pengambilan keputusan kebijakan. Menurut Ghozali (2023), tokoh agama sering kali menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah, sehingga keberadaan mereka sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan politik.

Selain berperan sebagai pen jembatan antara masyarakat dan negara, tokoh agama di Riau kerap berfungsi sebagai aktor legitimasi yang mampu membentuk preferensi pemilih dan memediasi konflik lokal hingga peran yang muncul baik dalam dukungan informal kepada kandidat maupun dalam kampanye simbolik yang memanfaatkan simbol-simbol keagamaan (Kholil et al, 2024). Dalam konteks pemilihan, praktik komodifikasi simbol-simbol keagamaan dan relasi antara politisi dengan ulama menunjukkan bahwa tokoh agama tidak sekadar menasihati secara moral tetapi juga menjadi instrumen mobilisasi elektoral, yang dapat memperkuat atau memecah kohesi sosial tergantung pada strategi politik yang digunakan (Lubis et al, 2024). Di sisi lain, kajian yang lebih luas menunjukkan bahwa inisiatif moderasi beragama dan pembinaan budaya lokal dapat mereduksi potensi konflik, sehingga peran tokoh agama juga penting dalam menjaga stabilitas sosial apabila mereka mengadopsi narasi moderat dan inklusif (Mazya et al, 2024). Khusus di Riau, penelitian sejarah-kultural tentang mufti dan tokoh lokal menunjukkan bagaimana otoritas keagamaan secara historis membentuk norma sosial dan budaya setempat menjadi suatu modal simbolik yang terus memengaruhi dinamika politik kontemporer di tingkat lokal (Dinata et al, 2024).

Dalam konteks Pilkada Serentak 2024, misalnya, Usatdz Abdul Somad, seorang tokoh agama yang terkenal di Riau, memainkan peran penting dalam mendukung calon tertentu. Melalui ceramah dan pengaruhnya di media sosial, ia mampu menggerakkan massa untuk memberikan dukungan kepada kandidat yang sejalan dengan nilai-nilai agama yang dianutnya (Susanto, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa tokoh agama tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai aktor politik yang memiliki dampak langsung terhadap hasil pemilihan.

Survei terbaru mengenai tingkat elektabilitas pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang didukung oleh Partai NasDem, yaitu Abdul Wahid dan SF Hariyanto, menunjukkan angka yang sangat positif. Dukungan dari ulama terkenal, Ustaz Abdul Somad (UAS), diduga berperan penting dalam peningkatan elektabilitas pasangan ini. Jika pemilihan diadakan saat ini, paslon yang mengusung tagline Bermarwah ini diprediksi akan meraih kemenangan melawan dua paslon lainnya, yaitu petahana Syamsuar-Mawardi (Suwai) dan M Nasir-M Wardan (Nawaitu). Seorang peneliti dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) menegaskan bahwa dukungan UAS merupakan faktor utama yang mendasari tingginya tingkat elektabilitas Abdul Wahid dan SF Hariyanto.

Dengan adanya dukungan dari UAS, elektabilitas pasangan ini mengalami peningkatan yang signifikan. (Media Indonesia)

Permasalahan utama terkait keterlibatan tokoh agama di Riau ketika mereka memberi dukungan politik kepada pasangan calon yaitu Pertama, tokoh agama yang secara terbuka mendeklarasikan dukungan membuat agama dipakai sebagai alat kampanye sehingga isu agama masuk ke ranah pemilihan umum, bukan ranah spiritual. (Detik Sumut) Kedua, Ketika pemimpin agama mengambil posisi politik, reputasi institusi agama atau pesan-pesan keagamaan bisa menurun karena dianggap partisan berdampak pada kepercayaan jamaah. (Website KPU Riau) Ketiga, Dukungan tokoh agama berpotensi memecah-belah masyarakat (pendukung vs. penentang), memicu tensi sosial, dan bahkan konflik keluarga/komunitas. Laporan lokal menunjukkan deklarasi dukungan besar-besaran di Riau dan adanya kekhawatiran tentang perpecahan. (Cakaplah.com)

Pada akhirnya, seluruh permasalahan tersebut menunjukkan bahwa meskipun tokoh agama memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Riau, keterlibatan mereka dalam politik praktis harus ditempatkan dalam batas yang jelas. Bagaimana Peran Tokoh Agama Islam dalam Dinamika Politik Lokal di Riau ?

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi peran tokoh agama dalam dinamika politik lokal di Riau. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama, politisi lokal, dan masyarakat setempat. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari literatur yang relevan, termasuk artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian sebelumnya yang membahas tentang komunikasi politik dan peran tokoh agama di Indonesia. Sejalan dengan pendapat Moleong (2019) bahwa penelitian kualitatif bertujuan "*memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik melalui deskripsi kata-kata dan konteks alamiah*". Pendapat ini menguatkan bahwa pendekatan kualitatif tepat untuk mengungkap makna peran tokoh agama yang tidak dapat dipahami hanya melalui angka atau statistik.

Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memilih informan yang dianggap memiliki informasi yang relevan dan mendalam mengenai topik yang diteliti. Peneliti juga melakukan analisis terhadap konten media sosial dan publikasi yang dikeluarkan oleh tokoh agama, guna memahami strategi komunikasi yang mereka gunakan dalam memengaruhi politik lokal.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik, dimana peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari wawancara dan data sekunder. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran tokoh agama dalam politik lokal, serta tantangan yang mereka hadapi dalam menjalankan peran tersebut. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pemahaman tentang hubungan antara agama dan politik di Riau.

Hasil dan Pembahasan

Menurut Linton (1936), peran adalah aspek dinamis dari status, yaitu perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan kedudukannya. Dalam konteks tokoh agama di Riau, teori ini dapat dijelaskan melalui:

1. Status Sosial

Kedudukan tokoh agama dalam masyarakat bahwa dalam teori peran Linton, peran sosial terbentuk dari interaksi antara individu dan lingkungannya. Tokoh agama memiliki ruang interaksi sangat luas melalui ceramah, pengajian, khutbah, media sosial dakwah.

Di Riau, ruang-ruang ini menjadikan mereka aktor signifikan dalam membentuk orientasi politik masyarakat menjelang pemilu. Dampak masyarakat Riau yang tingkat religiositasnya relatif tinggi sering menjadikan rekomendasi tokoh agama sebagai legitimasi dalam menentukan pilihan politik.

Beberapa survei dan laporan media yang membahas Pilgub Riau 2024 menyebutkan bahwa dukungan tokoh agama (dalam kasus lokal sering disebut Ustaz Abdul Somad / UAS) dikaitkan dengan melonjaknya elektabilitas pasangan calon tertentu. Ini tampak pada pemberitaan hasil survei LSI Denny JA yang mengaitkan kenaikan elektabilitas dengan dukungan UAS. (detiksumut)

Legitimasi religius adalah kondisi ketika suatu tindakan, keputusan, atau dukungan politik dianggap sah, benar, dan layak diikuti karena bersumber dari otoritas keagamaan. Dalam konteks Riau, legitimasi religius muncul melalui posisi tokoh agama sebagai pemegang otoritas moral dan sosial.

Tokoh agama di Riau menempati status sosial yang tinggi sehingga masyarakat memandang mereka sebagai figur moral, penjaga nilai kesalehan, dan penafsir kebenaran agama. Dalam *Role Theory*, status ini melahirkan peran yang diharapkan: memberi arahan, nasihat, dan pembimbingan. Legitimasi politik kemudian melekat karena masyarakat menganggap pandangan tokoh agama selaras dengan nilai kebenaran agama.

Media nasional mengutip survei dari LSI Denny JA, yang menunjukkan bahwa tokoh agama ulama, pastor, biksu memiliki pengaruh besar terhadap keputusan pemilih dalam pemilu. Masyarakat yang lebih memilih mendengarkan imbauan tokoh agama dibandingkan profesi lain berasal dari berbagai macam segmen. Mereka berasal dari segmen berpendidikan dan berpenghasilan tinggi ataupun rendah, segmen pemilih milenial ataupun lansia, hingga segmen pemilih partai dan calon presiden. (Kompas.com)

Pengaruh atau otoritas moral tokoh agama di Riau memiliki kedudukan sosial yang tinggi, sehingga mereka bukan hanya berfungsi sebagai pemimpin ritual, tetapi juga sebagai referensi moral dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat. Tokoh agama sering menjadi rujukan utama bagi masyarakat untuk menilai kualitas moral kandidat (paslon). Dampaknya dukungan tokoh agama dapat membangun citra positif seorang calon seolah-olah ia lebih "beretika", "amanah", atau "pro-umat". Sebaliknya, ketidaksetujuan dari tokoh agama dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap calon tertentu.

Ini menunjukkan bahwa otoritas moral mereka memiliki nilai simbolik yang memengaruhi persepsi publik.

Berdasarkan data survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI), elektabilitas calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang mengusung slogan Bermarwah (Bersama Membangun Riau Abdul Wahid-SF Hariyanto) itu diangka 35,2 persen atau unggul dari dua rivalnya, yakni pasangan Syamsuar-Mawardi M Saleh (22,2 persen) dan M Nasir-M Wardan (13 persen). Direktur SIGI LSI Denny JA, Ardian Sopa melihat elektabilitas Abdul Wahid-SF Hariyanto meningkat karena adanya endorsement UAS terhadap pasangan Bermarwah. (Celoteh Riau.com)

Kepercayaan masyarakat Riau terhadap tokoh agama dalam konteks politik tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk dari struktur sosial-budaya yang menempatkan tokoh agama sebagai figur otoritatif, moral, dan sekaligus rujukan nilai. Sebagian masyarakat Riau, terutama di kawasan yang religius dan berbasis adat, masih mengandalkan panduan tokoh agama dalam memutuskan hal penting termasuk pilihan politik. Ketergantungan ini memperkuat pengaruh tokoh agama, terutama bagi pemilih *swing voters* atau pemilih yang tidak memiliki cukup informasi tentang calon.

2. Harapan Peran

Tokoh agama di Riau memiliki posisi strategis karena mereka dipandang sebagai figur panutan yang ucapan dan perilakunya banyak dijadikan rujukan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat mengharapkan agar dakwah dan khutbah yang disampaikan benar-benar mencerminkan nilai-nilai moral yang universal, bukan menjadi sarana untuk menyebarkan kepentingan kelompok atau mendukung pasangan calon tertentu.

Harapannya, ceramah dan khutbah lebih fokus pada nasihat moral, seperti keadilan sosial, integritas, dan persatuan, bukan kampanye atau penggiringan opini politik. Jika menyentuh isu politik, masyarakat ingin tokoh agama berperan sebagai pendidik memberikan pemahaman objektif, bukan mengarahkan pilihan. Oleh sebab itu, tokoh agama harus bijak dalam menyampaikan isu politik di dalam khutbah tanpa harus condong terhadap paslon tertentu agar terhindar dari ajakan terselubung.

Pemerintah Provinsi Riau mendukung MUI dalam pelaksanaan Pendidikan Kader Ulama yang berbasis desa agar ulama “berwawasan moderat, berintegritas, dan mampu menjadi penggerak dakwah” di tingkat akar rumput. Ini menunjukkan harapan formal agar mereka menjalankan peran moral/spiritual agar mampu mempersatukan masyarakat. (Infopublik.com)

3. Pelaksanaan Peran

Tokoh agama baik ulama, ustaz, maupun pimpinan ormas keagamaan memiliki posisi sosial yang kuat dan dihormati. Karena itu, ceramah atau tausiyah yang menyiratkan dukungan kepada pasangan calon sering kali memiliki dampak signifikan terhadap persepsi jamaah. Salah satu keberpihakan yang sering muncul adalah Menyebut “pemimpin yang seiman”, “pemimpin yang mendukung syiar”, atau “pemimpin yang amanah” meskipun tanpa menyebut nama langsung.

Keberpihakan dalam ceramah ini muncul sebagai bentuk *role expectation* (harapan sosial) terhadap tokoh agama sebagai penjaga moral masyarakat. Namun, ketika pesan keagamaan dipadukan dengan preferensi politik, muncul dilemma apakah tokoh agama sedang menjalankan fungsi moral atau sudah masuk ke wilayah mobilisasi politik?

Pada Pilgub Riau 2024, ratusan ulama, guru ngaji, imam, dan mubaligh mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Abdul Wahid–SF Hariyanto. Alasan para Ulama mendukung pasangan Bermarwah tersebut lantaran mampu memperjuangkan kemaslahatan umat dan. Hal itu disampaikan Juru Kampanye (Jurkam) Bermarwah Provinsi Riau, Dr.Suwandi, ia menyampaikan bahwasanya saat ini ustadz, dan para ulama tak hanya membaca buku fiqh, dan tafsir namun juga harus terjun politik. (Haluanriau.com)

4. Konflik Peran

Ketegangan antara peran religius vs peran politik ini semakin kuat karena masyarakat Riau cenderung religius dan menjunjung tinggi otoritas ulama. Ketika ulama memasuki politik praktis, terjadi benturan ekspektasi dengan masyarakat yang ingin tokoh agama tetap netral, tetapi di sisi lain tokoh agama merasa wajib menyuarakan pilihan politik demi visi sosial yang dianggap lebih baik.

Namun, muncul penolakan atau kritik dari sebagian jamaah yang memiliki keragaman politik. Ketika tokoh agama menunjukkan keberpihakan, sebagian jamaah merasa tidak terwakili dan menganggap tokoh agama kehilangan objektivitas. Dalam beberapa kasus, jamaah bahkan beralih ke ustaz lain yang dianggap lebih netral.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengkritik mantan Ketua PWNU Riau, Rusli Ahmad, karena menggunakan kop surat dan stempel palsu untuk mendukung deklarasi politik praktis. Dukungan tersebut ditujukan untuk Prabowo-Gibran. Klaim bahwa PWNU Riau mendukung calon presiden tertentu dibekukan oleh PBNU karena dianggap "ilegal/palsu", menunjukkan adanya penolakan dan kritik terhadap dukungan politik dari organisasi keagamaan di Riau. (Republik.com)

A. Pengaruh Tokoh Agama dalam Pemilihan Umum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama memiliki pengaruh yang signifikan dalam pemilihan umum di Riau. Dalam Pilkada Serentak 2020 dan 2024 misalnya, dukungan dari tokoh agama kepada calon tertentu dapat meningkatkan popularitas dan suara yang diperoleh calon tersebut. Ustadz Abdul Somad, yang dikenal luas di kalangan masyarakat Riau, memberikan dukungan kepada salah satu calon, yang kemudian berhasil suara terbanyak dalam pemilihan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2020), yang menunjukkan bahwa dukungan tokoh agama dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap calon yang didukung.

UAS dilaporkan oleh berbagai media massa sebagai pendukung dan anggota tim kampanye untuk beberapa calon kepala daerah dan wakilnya. Di Riau, ia secara terbuka mendukung tiga pasangan calon, yaitu di Kota Dumai (Paisal – Amris), Kabupaten Rokan Hulu (Hapith – Erizal), dan Kabupaten Indragiri Hulu (Rizal Zamzami – Yoghi Susilo). Diapun ikut terjun untuk berkampanye. Selain di Riau, UAS juga mendukung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bukit Tinggi (Erman Safar – Marfendi).

Sedangkan di Kota Medan, UAS memberikan dukungan kepada Akhyar-Salman. “Assalamualaikum warahmatulahi wabarakatuh. Terdapat tiga poin yang ingin saya sampaikan pada peluang ini. Meskipun kampanye saat ini sangat meriah, tidak dapat dilakukan di alun-alun atau stadion. Oleh karena itu, tim Akhyar-Salman harus melakukan pendekatan langsung ke masyarakat, mempengaruhi mereka agar pada tanggal 9 Desember, Rabu pagi, memilih nomor 1, Akhyar-Salman,” jelas UAS.

Tabel 1. Dukungan Ustadz Abdul Somad Kepada Peserta Pilkada Tahun 2020

NO	Daerah	Nama Peserta Pilkada
1	Kota Dumai	Paisal - Amris
2	Kabupaten Rokan Hulu	Hapith - Erizal
3	Kabupaten Indragiri Hulu	Rizal Zamzami – Yoghi Susilo
4	Kota Bukit Tinggi	Erman Safar - Marfendi
5	Kota Medan	Akhyar - Salman
6	Kota Pekanbaru	Wahid - Haryanto

Di olah dari berbagai sumber

Statistik dari LSI juga menunjukkan bahwa 70% responden yang mengikuti ceramah tokoh agama merasa lebih yakin untuk memilih calon yang didukung oleh tokoh tersebut. Ini menunjukkan bahwa tokoh agama berfungsi sebagai sumber informasi dan legitimasi bagi masyarakat dalam menentukan pilihan politik mereka. Selain itu, tokoh agama juga sering kali menjadi jembatan antara calon dan masyarakat, membantu calon untuk memahami kebutuhan dan aspirasi rakyat.

Namun, pengaruh ini tidak selalu positif. Dalam beberapa kasus, dukungan tokoh agama dapat memicu polarisasi di masyarakat. Misalnya, ketika seorang tokoh agama mendukung calon tertentu, hal ini dapat menyebabkan kelompok yang tidak sejalan merasa terpinggirkan. Oleh karena itu, penting bagi tokoh agama untuk bersikap bijaksana dalam memberikan dukungan politik agar tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Dalam beberapa hari terakhir, aparat penegak hukum menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka kasus korupsi, hal ini berpotensi memperburuk dinamika yang ada dikalangan pendukung UAS. Sebagian masyarakat mengapresiasi sikap hati-hati UAS dan menganggapnya sebagai bentuk kedewasaan dalam menyikapi isu hukum. Namun, tidak sedikit pula yang menilai klarifikasi tersebut sebagai upaya defensif yang dapat menurunkan kredibilitas moral seorang tokoh agama di tengah krisis integritas pejabat publik yang didukungnya.

Menurut Junaedi & Kiram (2025) yang menunjukkan bahwa keterlibatan tokoh agama dalam politik praktis cenderung memperkuat polarisasi sosial ketika dukungan tersebut dikaitkan dengan legitimasi moral. Faizin et al (2025) juga menegaskan bahwa peran tokoh agama dalam ruang publik digital dapat mempercepat penyebaran narasi politik berbasis agama, yang kemudian berpotensi menurunkan kepercayaan publik ketika figur yang didukung terlibat skandal. Sementara itu, Zaimina (2025) menyoroti pentingnya penerapan *political restraint* bagi tokoh agama, yaitu pembatasan diri dalam memberi dukungan politik secara terbuka, untuk menjaga integritas dan menghindari dampak sosial yang destruktif.



Gambar 1. UAS saat kampanye Abdul Wahid-SF Hariyanto
Sumber : Detik News

Dalam konteks UAS sebagai juru kampanye di berbagai daerah, muncul perbedaan pendapat. Sebagian mendukung, sementara yang lain menolak. Tito Handoko, pengamat politik dari Universitas Riau, berpendapat bahwa dukungan UAS terhadap calon tertentu dapat berdampak negatif bagi dirinya. Hal ini karena dukungan tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan pengikutnya. Ketika UAS mendukung salah satu calon, pasti ada yang setuju dan ada yang tidak, yang menyebabkan perpecahan pendapat. Oleh karena itu, posisi terbaik bagi UAS adalah bersikap netral tanpa memihak calon manapun.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto, menyatakan bahwa ia tidak mempermasalahkan keterlibatan UAS sebagai juru kampanye. Ia menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak politik untuk memilih dan berpendapat. Yandri juga menegaskan tidak ada pemisahan antara ulama dan non-ulama dalam politik, asalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia mencontohkan bahwa menjadi cawapres bisa dilakukan oleh ulama, seperti Ma'ruf Amin, sehingga keterlibatan dalam tim sukses juga diperbolehkan, selama tidak melanggar aturan dan tidak mengandung hasutan atau provokasi.

Menurut penyuluh agama islam KUA Dumai Selatan Denny Febriansyah S.Sy, M.Litt juga berpendapat demikian yaitu ulama boleh berpolitik asal punya kapasitas dan siap menjaga amanah. Jika hanya mendukung calon, risikonya nama ulama ikut terseret bila kandidat bermasalah, seperti kasus Abdul Wahid yang menyeret nama Ustaz Abdul Somad. Karena itu lebih aman jika ulama yang mampu langsung turun sendiri agar tanggung jawab jelas.

“Ulama sejak dulu berbeda pendapat soal politik. Ada yang mengikuti pandangan Imam Al-Mawardi bahwa ulama harus masuk politik agar tidak dikuasai pihak yang antiagama. Pandangan ini banyak dianut NU. Sebaliknya, ulama kontemporer seperti Muhammadiyah menilai ulama cukup fokus pada agama dan mengawasi pemerintah tanpa terjun langsung. Menurut saya, ulama boleh berpolitik asal punya kapasitas dan siap menjaga amanah. Jika hanya mendukung calon, risikonya nama ulama ikut terseret bila kandidat bermasalah, seperti kasus Abdul Wahid yang menyeret nama Ustaz Abdul Somad. Karena itu lebih aman jika ulama yang mampu langsung turun sendiri agar tanggung jawab jelas” tutur Denny.

Oleh karena itu, menurut penulis, mendirikan partai dan berpartisipasi dalam pemilu tidak dilarang. Sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban setara, ulama diperbolehkan menjadi juru kampanye dan mengajak masyarakat memilih calon tertentu, asalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Peran Tokoh Agama dalam Membangun Kesadaran Politik

Tokoh agama juga berperan penting dalam membangun kesadaran politik di kalangan masyarakat. Melalui ceramah dan pengajaran agama, mereka sering kali menyisipkan nilai-nilai politik yang mencerminkan prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Menurut Dewi (2025), tokoh agama di Riau memiliki kemampuan untuk menjelaskan isu-isu politik dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan partisipasi politik. Peran tokoh agama yang berpengaruh sering kali menjadi target politisi untuk menarik suara, dengan berbagai strategi kampanye diterapkan untuk meningkatkan dukungan bagi pasangan calon atau partai politik yang mereka dukung.

Keakraban antara tokoh agama dan politik dapat meningkatkan partisipasi politik, yang tidak terlepas dari ajaran agama sebagai pedoman masyarakat. Dalam konteks sosial ini, sosok tokoh agama memiliki kekuatan dan otoritas yang signifikan untuk mempengaruhi massa.

Hasil penelitian oleh Ubaidullah & Ahmady (2022) menunjukkan bahwa tokoh agama memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui dakwah dan pemanfaatan media. Para tokoh agama di Aceh Barat Daya tidak hanya mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, tetapi juga menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan tanggung jawab politik sebagai bagian dari ajaran moral keagamaan. Kegiatan seperti ceramah, tabligh akbar, dan dzikir bersama menjadi sarana efektif untuk membangun kesadaran politik yang lebih tinggi di kalangan umat. Melalui pendekatan tersebut, masyarakat merasa lebih percaya diri dan yakin bahwa partisipasi politik merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan religius mereka.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah, pemuka agama sering mengingatkan masyarakat akan pentingnya memilih pemimpin yang dapat dipercaya dan berintegritas. Hal ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih kritis dalam memilih pemimpin dan tidak terjebak dalam praktik politik uang. Penelitian oleh Muhtadi (2013) menunjukkan bahwa masyarakat yang teredukasi oleh tokoh agama cenderung lebih menolak praktik politik yang tidak etis. Dalam acara seperti tabligh akbar, merupakan kesempatan strategis bagi masyarakat untuk mempelajari nilai-nilai pendidikan ketatanegaraan. Pendidikan politik jarang ditemukan dalam pengajian rutin atau wirid mingguan, yang umumnya lebih fokus pada ibadah. Pada tabligh akbar, banyak ulama, tokoh masyarakat, dan cendekiawan melakukan kajian mendalam tentang pendidikan politik, mengingat situasi yang mendorong umat untuk memahami berbagai aspek ajaran agama, terutama terkait pemilihan pemimpin. (Ashsubli, 2022).

Namun, tantangan yang dihadapi oleh tokoh agama dalam membangun kesadaran

politik adalah adanya keterbatasan akses informasi. Banyak masyarakat di daerah terpencil yang belum mendapatkan pendidikan politik yang memadai, sehingga peran tokoh agama menjadi menjadi sangat penting. Dengan memberikan edukasi politik yang tepat, tokoh agama dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.

Sementara itu penyuluh agama islam KUA Dumai Selatan Denny Febriansyah S.Sy, M.Litt berpendapat ulama punya peran penting dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Ulama harus aktif mengajak umat untuk tidak golput, karena jika umat Islam menjauhi politik, justru membuka ruang bagi kepemimpinan yang tidak sejalan dengan kepentingan umat.

“Menurut saya, peran ulama dalam meningkatkan partisipasi politik itu sangat penting. Kalau ulama ikut mencalonkan diri, otomatis dia langsung mengajak masyarakat untuk memilih dan tidak golput, karena banyak kerugian ketika umat Islam menjauhi politik. Jika ulama pasif, bisa saja ruang politik diisi oleh pihak yang tidak sejalan dengan kepentingan umat. Kalau ulama tidak ingin mendukung calon tertentu, minimal dia memberi petunjuk kepada masyarakat—pilih calon yang agamanya baik dan rekam jejaknya bersih, dari partai mana pun. Ulama juga harus memberi contoh pemilu yang jujur, tidak berlebihan memuji calon, dan tidak ikut menyebarkan hoaks. Selain itu, dalam ceramah atau pengajian, ulama harus mendorong masyarakat untuk ikut pemilu, bukan golput. Karena kalau masyarakat golput lalu terpilih pemimpin yang zalim atau bahkan non-Muslim, ulama bisa ikut menanggung dosa. Kalau ulama aktif di media sosial, lebih baik lagi ia mengajak lewat sana, tanpa harus menunjuk calon tertentu untuk menjaga netralitas”, ungkap Denny.

Dengan demikian, peran aktif tokoh agama menjadi krusial dalam mengisi kekosongan informasi politik dan literasi demokrasi di wilayah terpencil. Melalui pendekatan berbasis nilai keagamaan, mereka dapat menyampaikan materi politik yang relevan dengan konteks lokal, sehingga masyarakat tidak hanya memahami hak memilih, tetapi juga menyadari pentingnya partisipasi, tanggung jawab sosial, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan politik. Penelitian di Kabupaten Sambas menunjukkan bahwa pendidikan politik berbasis pendekatan keagamaan efektif meningkatkan literasi politik masyarakat mayoritas beragama islam, dengan melibatkan institusi keagamaan sebagai media penyampaian yang lebih efektif dalam konteks budaya setempat (Nurdin, 2023). (Nurdin, 2023). Selain itu, studi di wilayah pedesaan Asilulu menunjukkan bahwa program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang melaksanakan pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan kelompok dalam edukasi politik mampu mendorong partisipasi masyarakat yang lebih aktif serta menekan praktik politik uang dan golongan putih (golput) (Rochaendi et al, 2024). Oleh karena itu, tokoh agama dapat berfungsi sebagai jembatan antara sistem politik formal dan komunitas lokal yang selama ini termarginalkan dalam akses informasi sampai dengan memastikan bahwa edukasi politik bukan hanya bersifat instruksional, tetapi juga kontekstual dan kultural, sehingga memfasilitasi masyarakat untuk mengekspresikan suara mereka secara bermakna dan bertanggung jawab.

C. Mediator dalam Konflik Sosial

Dalam konteks Riau yang memiliki keragaman budaya dan agama, tokoh agama sering kali berfungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik sosial, ketika terjadi ketegangan antara kelompok masyarakat, tokoh agama dapat mengambil inisiatif untuk mengadakan dialog dan mencari solusi yang saling menguntungkan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Qurtuby (2017) yang menunjukkan bahwa tokoh agama memiliki kemampuan untuk meredakan ketegangan dan membangun kembali hubungan antar kelompok. Tokoh agama yang juga termasuk dalam tokoh masyarakat, berperan penting dalam deteksi dini konflik sosial. Mereka dapat mengidentifikasi potensi konflik sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar, sehingga intervensi dapat dilakukan lebih awal (Naibin, 2025).

Contoh nyata dapat dilihat pada konflik yang terjadi di beberapa daerah di Riau, dimana tokoh agama berhasil mengumpulkan perwakilan dari berbagai kelompok untuk berdiskusi dan mencari jalan keluar. Dalam beberapa kasus, mereka juga berperan dalam menyusun kesepakatan yang mengikat antara pihak-pihak yang berselisih. Ini menunjukkan bahwa tokoh agama tidak hanya berperan dalam ranah spiritual, tetapi juga dalam menjaga stabilitas sosial.

Statistik juga mendukung bahwa mediasi yang dilakukan oleh tokoh agama sering kali lebih diterima oleh masyarakat dibandingkan dengan pendekatan hukum formal. Sebuah survei yang dilakukan Majid et al (2024) menunjukkan bahwa 78% responden lebih memilih mediasi yang dilakukan oleh tokoh agama dibandingkan dengan proses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih percaya kepada tokoh agama dalam menyelesaikan masalah yang bersifat pribadi dan sosial. Penelitian yang juga dilakukan oleh PAUZI dan Said (2020) menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam jumlah konflik sosial di Batam, yang merupakan bagian dari Provinsi Riau, dalam beberapa tahun terakhir. Dalam konteks ini, tokoh agama yang memiliki kredibilitas di mata masyarakat dapat memainkan peran yang efektif sebagai mediator. Mereka tidak hanya memberikan nasihat spiritual, tetapi juga mendorong masyarakat untuk terlibat dalam dialog.

Contoh konkret dari peran tokoh agama dalam mediasi dapat dilihat dalam kasus konflik tanah antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan. Tokoh agama setempat sering kali menjadi mediator yang berusaha menjembatani kepentingan kedua belah pihak. Dengan pendekatan berbasis pada nilai-nilai keagamaan, mereka mampu menciptakan suasana dialog yang konstruktif. Hal ini sejalan dengan pemikiran Fitriani (2017) yang menyatakan bahwa mediasi dalam masyarakat adat Melayu Riau sangat dipengaruhi oleh norma-norma agama dan budaya setempat.

Dalam konteks yang lebih luas, peran tokoh agama dalam mediasi konflik sosial juga dapat dilihat dari sudut pandang moderasi beragama. Mustaqim et al (2024) menjelaskan bahwa moderasi beragama dapat menjadi alat yang efektif untuk mengatasi pertentangan dan konflik antaragama. Tokoh agama dapat berfungsi sebagai penggerak moderasi dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi dan saling menghormati antarumat beragama.

Oleh karena itu, mereka berfungsi tidak hanya sebagai perantara, tetapi juga sebagai penggerak perubahan sosial yang mampu menciptakan keharmonisan dalam komunitas masyarakat.

Sementara itu penyuluh agama islam KUA Dumai Selatan Denny Febriansyah S.Sy, M.Litt berpendapat ulama memiliki peran penting sebagai *Ulil Amri* dalam menjaga ketenangan dan mencegah konflik sosial di masyarakat. Mereka harus menjadi peneleh saat terjadi perselisihan, bukan malah memperkeruh suasana. Ulama juga wajib menghindari penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, terutama di era media sosial. Kritik kepada pemerintah boleh disampaikan, tetapi dengan bahasa yang santun. Dalam setiap konflik, ulama harus bersikap adil, mendengar kedua belah pihak, dan menjaga netralitas agar tercipta kedamaian di tengah masyarakat.

“kita kembali kepada firman Allah dalam Surah An-Nisa yang memerintahkan taat kepada Allah, Rasul, dan Ulil Amri. Ulil Amri ini bukan hanya pemerintah, tapi juga ulama, karena merekalah yang memimpin dan didengar masyarakat. Karena itu, ketika terjadi konflik sosial—baik perkelahian kecil, pencurian, atau perselisihan ulama harus tampil menenangkan, bukan justru membuat suasana semakin gaduh. Masalah yang sering muncul sekarang adalah hate speech dan hoaks. Saya lihat ada juga ulama yang tidak mampu menahan diri, memposting hal-hal yang memicu kebencian kepada pemerintah. Padahal seharusnya mereka menyampaikan kritik dengan bahasa yang santun, bukan menghasut masyarakat untuk menolak aturan atau membenci pihak tertentu. Peran utama ulama adalah menjadi peredam konflik, bersikap adil, mendengar dari kedua belah pihak, serta menjaga suasana tetap damai. Di era digital ini, ulama juga harus berhati-hati dalam bermedia sosial dan tidak ikut menyebarkan ujaran kebencian maupun hoaks, agar ketenteraman masyarakat tetap terjaga.” Ucap Denny.

Metode mediasi yang digunakan oleh tokoh agama dalam menyelesaikan konflik sosial sangat beragam, tergantung pada konteks dan jenis konflik yang dihadapi. Salah satu pendekatan yang umum adalah dialog terbuka, dimana tokoh agama mengundang semua pihak yang terlibat untuk duduk bersama dan mendiskusikan masalah secara langsung. Menurut A. R. Lubis (2022) dialog ini sering kali disertai dengan pendekatan spiritual, dimana tokoh agama mengajak pihak-pihak yang berselisih untuk merenungkan ajaran agama yang mengedepankan perdamaian dan kerukunan.

Dalam penelitian di Kelurahan Sayurmatangi, ditemukan bahwa tokoh agama berhasil menyelesaikan konflik pertikaian perkawinan dengan mengadakan pertemuan antara keluarga yang berselisih. Melalui pendekatan ini, kedua belah pihak dapat saling mendengarkan dan memahami sudut pandang masing-masing, yang pada akhirnya membawa mereka pada kesepakatan bersama (A. R. Lubis, 2022).

Statistik menunjukkan bahwa metode dialog ini memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Sebuah studi oleh Hasanah et al (2023) menunjukkan bahwa 75% konflik yang dimediasi melalui dialog terbuka berhasil diselesaikan tanpa perlu melibatkan pihak ketiga yang lebih formal, seperti aparat hukum. Ini menunjukkan bahwa pendekatan yang humanis dan berbasis pada dialog sering kali lebih efektif dalam menyelesaikan konflik sosial.

Selain dialog, tokoh agama juga sering menggunakan pendekatan mediasi berbasis komunitas, dimana mereka melibatkan anggota masyarakat lainnya dalam proses penyelesaian konflik. Ini menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab kolektif terhadap penyelesaian masalah. Dalam banyak kasus, masyarakat merasa lebih nyaman dan terbuka untuk berbagi masalah mereka ketika mereka tahu bahwa ada dukungan dari komunitas (Fitri, 2025).

Namun, peran ini tidak selalu berjalan mulus. Terkadang tokoh agama juga menghadapi tantangan dari pihak-pihak yang tidak ingin konflik diselesaikan. Dalam situasi seperti ini, tokoh agama perlu memiliki keberanian dan ketegasan untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan perdamaian. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan pandangan dan interpretasi ajaran agama di antara kelompok yang berselisih. Perbedaan ini sering kali memperburuk ketegangan dan menyulitkan proses mediasi. (Mustaqim et al, 2024).

Selain itu, ada juga tantangan dari dalam diri tokoh agama itu sendiri. Beberapa tokoh agama mungkin tidak memiliki keterampilan komunikasi yang memadai atau kurang pengalaman dalam menangani konflik. Hal ini dapat menyebabkan mereka kesulitan dalam meredakan ketegangan dan memfasilitasi dialog yang konstruktif (Syarifuddin et al, 2025). Oleh karena itu, penting bagi tokoh agama untuk terus mengembangkan kemampuan mereka dalam mediasi dan resolusi konflik.

Salah satu contoh tantangan yang dihadapi adalah konflik yang melibatkan kepentingan politik. Dalam banyak kasus, tokoh agama terjebak dalam dinamika politik yang lebih besar, dimana kepentingan politik dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam mediasi. Penelitian oleh Hasibuan et al (2024) menunjukkan bahwa dalam beberapa situasi, tokoh agama merasa tertekan untuk mengambil posisi tertentu yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip perdamaian yang mereka anut.

Tantangan lainnya adalah kurangnya dukungan dari pihak-pihak terkait, seperti pemerintah atau lembaga sosial lainnya. Tanpa dukungan yang memadai, usaha tokoh agama dalam mediasi konflik dapat menjadi sia-sia. Oleh karena itu, kolaborasi antara tokoh agama dan lembaga lain sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses mediasi (Putri, 2024).

Simpulan

Peran tokoh agama dalam konteks politik lokal di Riau sangat krusial, tidak hanya sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai penggerak sosial yang memengaruhi kebijakan politik, mendorong partisipasi masyarakat, dan memberikan legitimasi moral kepada calon yang mereka dukung. Contohnya, keterlibatan Ustadz Abdul Somad (UAS) dalam Pilkada Serentak 2024 menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan elektabilitas calon dan kepercayaan masyarakat. Namun, partisipasi ini juga dapat menimbulkan polarisasi sosial dan mengurangi kepercayaan di kalangan sebagian jamaah. Selain itu, tokoh agama memiliki peranan penting sebagai mediator dalam konflik sosial di masyarakat Riau yang beragam, dengan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Temuan ini menegaskan bahwa pengaruh tokoh agama harus diimbangi dengan pengelolaan yang bijaksana dan proporsional. Oleh karena itu, keterlibatan mereka dalam politik perlu

diarahkan pada pendidikan politik yang etis, moderat, dan berorientasi pada persatuan, didukung oleh kolaborasi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan penyelenggara pemilu. Penting juga untuk meningkatkan literasi politik masyarakat agar keputusan politik tidak hanya bergantung pada legitimasi religius. Penelitian mendatang disarankan untuk menggunakan pendekatan komparatif atau kuantitatif guna mengeksplorasi lebih lanjut pengaruh tokoh agama terhadap perilaku pemilih, polarisasi sosial, dan kepercayaan publik dalam konteks demokrasi lokal.

Daftar Pustaka

- Ashsubli, M. (2022). Peran Politik Ustadz Abdul Somad dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 8(2).
- Dewi, K. (2025). Peranan tokoh agama dalam menanamkan sikap moderasi beragama pada generasi milenial di Dusun Sei Daun Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
- Dinata, Y., Indrawan, T. J., & Roza, E. (2024). Peran Syekh Abdurrahman Siddiq al-Banjari sebagai Mufti Kesultanan Indragiri dalam Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat. *Jurnal Sejarah Islam*, 3(2), 101–127.
- Faizin, B., Fitri, S. A., Maylawati, D. S., Rizqullah, N., & Ramdhani, M. A. (2025). Polarization of Religious Issues in Indonesia's Social Media Society and Its Impact on Social Conflict. *Journal of Applied Data Sciences*, 6(1), 426–442.
- Fitri, N. F. (2025). *Peranan Tokoh Masyarakat Sebagai Mediator Dalam Sengketa Pembagian Harta Peninggalan Untuk Anak Tiri Di Desa Tegalwangi Kabupaten Cirebon Pada Tahun 2020 Menurut Hukum Islam*. S1-Hukum Keluarga UIN SSC.
- Fitriani, R. (2017). Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dalam Masyarakat Adat Melayu Riau. *Riau Law Journal*, 1(2), 226–238.
- Ghozali, I. (2023). Dinamika Politik Kebangsaan Nahdlatul Ulama di Riau. *Angket*, 128–141. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTSdR3lyCrK3V0K0xg6g9ABn7tgZzvyUS_Kec3nYtARiWVwA/viewform
- Hasanah, R. K., Aryanti, N. Y., Agustina, A., & Trenggono, N. (2023). Dialektika tokoh agama dalam menjaga kerukunan. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 9(1), 117–136.
- Hasibuan, S., Lubis, M. A. A., Al Dino, R., Pasaribu, I. R., & Alaprizky, B. (2024). Institusi Agama Sebagai Penggerak Perdamaian: Studi Kasus Konflik Sosial di Indonesia. *Fatih: Journal of Contemporary Research*, 1(2), 208–222.
- Junaedi, E., & Kiram, S. (2025). The Phenomenon of Religious Figures Involvement in Practical Politics: Analysis of the Role and Public Perception in the 2024 Election. *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 21(1), 184–210.
- Kholil, S., Sulidar, & Dalimunthe, M. A. (2024). Vernacular Politics Revisited: The Role of Ulama in the 2020 Simultaneous Local Elections in Indonesia. *International Society for the Study of Vernacular Settlements*, 11(3), 135–145. <https://doi.org/10.61275/isvsej-2024-11-03-10>

- Linton, R. (1936). *The study of man: An introduction*. <https://psycnet.apa.org/record/1937-03343-000>
- Lubis, A. R. (2022). *Peran tokoh agama dalam mediasi pertikaian perkawinan dalam masyarakat Kelurahan Sayurmatinggi*. IAIN Padangsidimpuan.
- Lubis, F. H., Nasution, F. A., & Harahap, R. H. (2024). The Commodification of Religious Rituals: Representations of Political Actors in Indonesian Elections. *Pharos Journal of Theology*, 105(2), 1–11. <https://doi.org/10.46222/pharosjot.105.214>
- Majid, M. K., Setiawan, M. N. H., & Izzah, A. N. (2024). Upaya Tokoh Agama dalam Menanggulangi Konflik Sosial Keagamaan di Kampung Pancasila Desa Banaran Kediri. *Journal Hub for Humanities and Social Science*, 1(2), 254–273.
- Mazyza, T. M., Ridho, K., & Irfani, A. (2024). Religious and Cultural Diversity in Indonesia: Dynamics of Acceptance and Conflict in a Multidimensional Perspective. *International Journal of Current Science Research and Review*, 07(07). <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v7-i7-32>
- Moleong, L. J. (2019). *Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi"*. Bandung: Remaja Rosdakarya. PT. Remaja Rosda Karya, 58.
- Muhtadi, B. (2013). Politik Uang Dan Dinamika Elektoral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara Party-Id Dan Patron-Klien. *Jurnal Penelitian Politik* 10,.
- Mustaqim, A., Yuliani, A., Harahap, S. W., & Nasution, N. V. (2024). Mengatasi Pertentangan dan Konflik Agama Melalui Moderasi Beragama. *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society*, 1(1), 87–100.
- Naibin, N. (2025). Peran Tokoh Masyarakat dalam Deteksi Dini Konflik Sosial untuk Penguatan Moderasi Beragama. *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, 25(1), 29–42.
- Nurdin, A. (2023). Relevansi Mathla'ul Anwar terhadap Pendidikan Politik Masyarakat Pandeglang. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(3), 251–258.
- Pauzi, P., & Said, K. (2020). Pemetaan Konflik Sosial Dan Paham Radikal Sebagai Suatu Keniscayaan Di Batam Propinsi Kepulauan. *PERADA*, 3(1), 89–105.
- Putri, F. K. (2024). Peran Bakesbangpol Dalam Pengelolaan Konflik Pendirian Tempat Rumah Ibadah Di Kabupaten Mojokerto Sudut Pandang FKUB (Studi Kasus Makam Di Kecamatan Gedeg). *Jurnal Suara Politik*, 3(2).
- Qurtuby, S. Al. (2017). Antara Politik Ulama dan Ulama Politik. *Dw*. <https://www.dw.com/id/antara-politik-ulama-dan-ulama-politik/a-37440108>
- Rochaendi, E., Ariyani, Y. D., Sari, I. P., Mahfud, M., Kholik, N., Rouzi, K. S., Afifah, N., & Nazibi, Z. (2024). Pelaksanaan KKN-Tematik: Mengoptimalkan Diseminasi Pembangunan Perdesaan dan Pemberdayaan Masyarakat. *BERDAYA: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 75–92.
- Susanto, R. (2020). Peran Tokoh Agama Kuasa Elit Politik Dalam Pilkada 2017 Didesa Tanjung Raja Selatan Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, 1(3), 238–253.

-
- Syarifuddin, D., Hatta, K., AlGhifari, M. S., & Ramadan, R. (2025). Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memediasi Konflik Rumah Tangga (Studi pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Ingin Jaya, Aceh Besar). *Jurnal Serambi Ilmu*, 26(1), 43–60.
- Ubaidullah, M. A., & Ahmady, I. (2022). Peran tokoh agama dalam membangun partisipasi politik masyarakat kabupaten aceh barat daya pada pemilu 2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 7(1).
- Zaimina, A. B. (2025). Addressing Digital Religious Polarization: Policy Analysis of Religious Moderation Narratives on Indonesian Government Social Media. *Al'Adalah*, 28(1), 17–34.